

ABSTRAK

ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK TERDAFTAR

(Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Oleh

MUHAMMAD RAZA ARI PUTRA

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek telah dilakukan dengan memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek, namun pada kenyataannya kejahatan hak atas merek tetap saja terjadi, salah satunya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Permasalahan penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dan menganalisis tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar didasarkan pada terpenuhinya kemampuan bertanggung jawab, yaitu terdakwa sudah berusia dewasa (33 tahun), mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Unsur kesalahan yaitu terdakwa dengan sengaja tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pemaaf terpenuhi karena terdakwa pada tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam keadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Saran dalam penelitian ini adalah majelis hakim dalam menangani tindak pidana merek di masa mendatang secara konsisten dan komprehensif mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam penjatuhan pidana. Majelis Hakim agar secara tepat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, agar pidana pidana tersebut benar-benar sesuai dengan kesalahan pelaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Tanpa Hak, Menggunakan Merek Terdaftar

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS WITHOUT THE RIGHT TO USE REGISTERED TRADEMARKS

(Study of Decision Number: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

By

MUHAMMAD RAZA ARI PUTRA

The government's efforts to provide protection to trademark rights holders have been carried out by enacting and renewing laws on trademarks, but in reality crimes against trademark rights still occur, one of which is in the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court. The problem of this research analyzes the basis for the judge's consideration of criminal acts without the right to use registered trademarks and analyzes criminal acts without the right to use registered trademarks in Decision Number: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

The type of research used is normative and empirical, with a statutory approach, case study and a conceptual approach. The type of data uses secondary data through literature studies. Data processing is carried out by selection, classification and compilation of data. Data analysis is carried out descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that the basis for the judge's consideration in imposing a criminal sentence on the perpetrator of a criminal act without the right to use a registered trademark in Decision Number: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk legally is that the defendant's actions have been legally proven to have committed a criminal act without the right to use a registered trademark as regulated in Article 100 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Philosophically, the judge considers that the sentence imposed is a form of guidance and can provide a deterrent effect on the perpetrator. Sociologically, the judge considers the aggravating and mitigating factors. Criminal liability for the perpetrator of a criminal act without the right to use a registered trademark is based on the fulfillment of the ability to be responsible, namely that the defendant is an adult (33 years old), is able to carry out legal actions or actions. The element of error is that the defendant intentionally used the registered trademark without the right even though he knew that the act was a criminal act. The element of no excuse is fulfilled because the defendant in the criminal act without the right to use the registered trademark was conscious or healthy and was not under pressure or coercion. The suggestion in this study is that the panel of judges in handling trademark crimes in the future consistently and comprehensively consider the legal, philosophical and sociological aspects in sentencing. The panel of judges should appropriately impose criminal responsibility on the perpetrators of the crime, so that the criminal penalty is truly in accordance with the perpetrator's mistake.

Keywords: Criminal Act, Without Rights, Using Registered Trademark.